

PENGARUH KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA
SEKOLAH TERHADAP KINERJA PELAKSANAAN
PROGRAM MPMBS PADA SMA NEGERI 2
WONOGIRI TAHUN 2005

TESIS



Oleh :

H. MUH. ALI SUKARDJA

NIM : Q. 100.010.104
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan
Konsentrasi : Manajemen Sekolah

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
2005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan terutama oleh sumber daya manusia yang berkualitas, yang hanya dapat dihasilkan oleh pendidikan yang berkualitas juga. Pengalaman membuktikan seperti di negara negara Jepang, Taiwan, Singapura pembangunan sangat cepat karena peran sumber daya manusianya.

Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan Undang-Undang. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 berisi bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan nasional (TAP MPR, 1993) diselenggarakan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama

peningkatan kualitas pendidikan dasar serta jumlah dan kualitas pendidikan kejuruan, sehingga memenuhi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan menumbuhkan kesadaran serta sikap budaya bangsa untuk selalu berupaya menambah pengetahuan dan ketrampilan serta mengamalkan sehingga terwujud manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lebih maju, mandiri, berkualitas dan menghargai setiap jenis pekerjaan yang memiliki harkat dan martabat sesuai dengan falsafah Pancasila.

Sejalan dengan tujuan pendidikan Departemen Pendidikan Nasional (Pendidknas) menetapkan 4 (empat) strategi dasar kebijakan pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan, meliputi :

1. Peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar dalam rangka pelaksanaan gerakan wajib belajar 9 tahun.
2. Peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan
3. Peningkatan relefansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan peserta didik.
4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan.

Untuk mewujudkan Pendidikan Nasional mengalami beberapa permasalahan Direktur Pendidikan Menengah Umum menerangkan bahwa salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan dasar dan menengah (Hanushek, 1979). Berbagai

usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.

Berdasarkan masalah ini, maka berbagai pihak mempertanyakan apa yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata (Dirjen Dikdasmen, 1999).

Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua *input* (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini menghasilkan *output* yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila *input* pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran dan perbaikan sarana prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, (*ouput*) secara otomatis akan terjadi. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi. Dalam menerapkan pendidikan *education function* terjadi memusatkan pada *input* pendidikan dan kurang memperhatikan pada

proses pendidikan. Padahal proses pendidikan sangat menentukan *output* pendidikan.

Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan mengajukan lembaga termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Faktor ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan *input* (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, *monitoring*, evaluasi dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan (*stakeholder*).

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, tentu saja perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju berbasis sekolah (MPMBS) dapat diartikan sebagai model

manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional (Soedijarto, 1991). Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Demikian juga, dengan pengambilan keputusan partisipatif, yaitu melibatkan warga sekolah secara langsung dalam pengambilan keputusan, maka rasa memiliki warga sekolah meningkat. Peningkatan rasa memiliki ini akan meningkatkan dedikasi warga sekolah terhadap sekolahnya. Inilah esensi pengambilan keputusan partisipatif. Baik peningkatan otonomi sekolah maupun pengambilan keputusan partisipatif tersebut kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional yang berlaku.

MPMBS bertujuan untuk mendirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Lebih rincinya, MPMBS bertujuan untuk (Dirjen Dikdasmen, 2001) :

- a. meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan yang tersedia;

- b. meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;
- c. meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah; dan
- d. meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

MPMBS diterapkan karena beberapa alasan berikut :

- a. sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah;
- b. sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya *input* pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik;
- c. pengemabilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahnya yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya;
- d. penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh msayarakat setempat;
- e. keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat;

- f. sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat pada umumnya, sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan;
- g. sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah setempat; dan
- h. sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.

Dalam pengimplementasikan MPMBS, sekolah memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan administrasi, keuangan dan fungsi setiap personil sekolah dan kebijakan yang telah dirumuskan. Kepala sekolah dengan orang tua dan masyarakat membuat keputusan, mengatur skala prioritas di samping harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional bagi guru, dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keyakinan masyarakat terhadap sekolah atau pendidikan. Kepala sekolah sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara profesional terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total dengan menciptakan kompetensi dan penghargaan di dalam sekolah itu sendiri maupun

sekolah lain. Ada empat hal akan terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total yaitu (Dirjen Dikdasmen, 1999) :

- a. perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus menerus mengumandangkan peningkatan mutu;
- b. kualitas atau mutu ditentukan oleh pengguna jasa sekolah;
- c. prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan pemaksaan aturan;
- d. sekolah harus menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap arif bijaksana, karakter, dan memiliki kematangan emosional.

Sistem kompetisi tersebut akan mendorong sekolah untuk terus meningkatkan mutu, sedangkan penghargaan memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan setiap personel sekolah, khususnya siswa. Kepala sekolah harus mengontrol semua sumber daya termasuk sumber daya manusia yang ada, dan menggunakan secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu khususnya. Sementara itu, kebijakan makro yang dirumuskan dalam rangka menjamin tujuan-tujuan yang bersifat nasional dan akuntabilitas yang berlingkup nasional.

Upaya peningkatan mutu atau kualitas pendidikan (tingkat dasar dan menengah) pada saat ini dengan pendekatan MPMBS adalah dengan menjadikan sekolah sebagai unsur penting yang menjadi pusat perhatian. Pemerintah, dalam

hal ini Departemen Pendidikan Nasional, mengakui bahwa sekolah merupakan kunci atau penentu bagi keberhasilan program yang akan dicapai. Dalam pada itu, keberhasilan program-program sekolah menjadi ukuran dalam meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan sekaligus meningkatkan sumberdaya manusia (anak didik).

Departemen pendidikan nasional menggariskan empat faktor kunci yang berperan dalam meningkatkan keberhasilan sekolah, yaitu *Man* (kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik lainnya), *material* (fasilitas sarana prasarana) *Money* (dana) dan *Management*.

Dari beberapa faktor tersebut, kepala sekolah dianggap memegang posisi sentral dalam mengelola sekolah. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan manajerial yang handal sesuai dengan tujuan dan target yang harus dicapai. Kepala sekolah mempunyai kemampuan kepemimpinan untuk mencapai tujuan SMP dan SMA.

Menyadari kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dan juga mempunyai tugas yang semakin berat, maka pemerintah (dalam hal ini Depdiknas) sangat concern terhadap pihak ini, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional menetapkan keputusannya (Keputusan Menteri Pendidikan nasional) RI Nomor : 0296/U/1996 tanggal 1 Oktober 1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan Nasional sekaligus untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kepala Sekolah dalam menjalankan program-

program sekolah, maka Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Tengah membuat indikator keberhasilan Kepala Sekolah di wilayahnya. Indikator-indikator ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Depdiknas terhadap Kepala Sekolah dalam fungsi dan tugasnya yang harus dijalankan.

Adapun indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan Kepala Sekolah sesuai dengan fungsi dan tugasnya adalah :

1. pendidik (*educator*);
2. manajer (*manager*);
3. administrator (*administrator*);
4. penyelia (*supervisor*);
5. pemimpin (*leader*).

Sementara itu, variabel-variabel yang menyertai indikator-indikator di atas dapat diuraikan seperti di bawah ini.

1. Kepala Sekolah sebagai pendidik (*educator*)

Kepala sekolah sebagai pendidik harus memiliki pemahaman terhadap Wawasan Wiyata Mandala dan harus mampu membimbing, membina, untuk menyamakan persepsi seluruh tenaga kependidikan dan siswa, terhadap nilai-nilai tersebut.

Membimbing dan membina guru, staf tata usaha serta siswa.

- a. memberikan tugas yang jelas;
- b. membimbing secara intensif agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu;

- c. meningkatkan wawasan melalui kegiatan curah pendapat, diskusi dan penataran;
 - d. memberikan petunjuk jika mendapat kesulitan atau masalah;
 - e. memberikan petunjuk perbaikan/pembetulan semua kegiatan, administrasi, PBM, administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian, surat menyurat.
2. Kepala Sekolah sebagai manajer (*manager*).

Kepala sekolah sebagai manajer harus memiliki program dan target yang harus diwujudkan selama masa jabatan kepemimpinannya. Untuk itu diperlukan pemahaman dan kemampuan dalam mengelola sumber daya kependidikan.

Mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai misi dan tujuan sekolah.

- a. guru dan staf tata usaha berperan aktif dalam penyusunan program kerja sekolah sehingga tersusun program tahunan. Program catur wulan dan program harian dilaksanakan berdasarkan jadwal serta memiliki catatan pelaksanaannya;
- b. guru dan staf tata usaha memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan struktur organisasi, bidang tugas dan rinciannya, serta membuat laporan berkala dengan format yang telah ditentukan;
- c. mengatur dan mengendalikan proses belajar dan mengajar sesuai dengan asas prinsip belajar tuntas;

- d. selalu mengadakan koordinasi dengan wakil kepala sekolah, kepala urusan tata usaha, pembantu pimpinan yang lain serta melaksanakan pengawas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. mengatur keuangan serta mengelola sarana prasarana yang dilaksanakan secara efisien sesuai dengan rpogram dan prosedur yang benar.
3. Kepala Sekolah sebagai administrator (*administrator*).

Kepala sekolah sebagai administratot harus memahami dan mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan adminsitasi yang tertib, lancar dan tepat waktu.

- a. Menyelenggarakan adminstrasi kegiatan belajar mengajar dan bimbingan sesuai dengan kurikulum.
 - 1) kelengkapan dokumen kurikulum;
 - 2) kelengkapan program;
 - 3) kelengkapan adminsitasi pelaksanaan PBM;
 - 4) kelengkapan administrasi penilaian hasil PBM.
- b. Menyelenggarakan administrasi ketatausahaan.
 - 1) kelengkapan adminstrasi persuratan;
 - 2) kelengkapan administrasi ketenagaan;
 - 3) kelengkapan administrasi perlengkapan dan sarana prasarana;
 - 4) kelengkapan administrasi keuangan;
 - 5) kelengkapan administrasi kesiswaan;
 - 6) kelengkapan administrasi sumber belajar.

- c. Menyelenggarakan administrasi 7K (keindahan, kesehatan, kemandirian, kebersihan, kerindangan dan kekeluargaan).

4. Kepala sekolah sebagai Penyelia (*Supervisor*)

Kepala sekolah sebagai penyelia harus mampu melaksanakan supervisi untuk memantau tenaga kependidikan agar tercapai proses belajar mengajar dengan baik.

a. Menyusun program supervisi.

- 1) pengertian dan tujuan supervisi;
- 2) jadwal supervisi untuk seluruh guru dan staf tata usaha;
- 3) penggunaan teknik supervisi klinik.

b. Memiliki dokumen pelaksanaan supervisi.

- 1) laporan dan instrumen;
- 2) catatan-catatan, antara lain : hambatan yang dapat diatasi, ketuntasan belajar yang dapat tercapai.

5. Kepala Sekolah sebagai Pemimpin (*Leader*)

Kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki sikap keteladanan, mampu menumbuhkan kreativitas, mampu memotivasi, mampu mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap sekolah serta mawas diri, pada guru dan staf tata usaha untuk mencapai misi, visi dan tujuan sekolah.

a. Teladan di sekolah dan masyarakat

- 1) diterima dan disayangi oleh seluruh warga sekolah;
- 2) konsisten antara pengucapan dan perbuatan;

- 3) memberikan dorongan dan meningkatkan semangat kerja staf;
 - 4) terbuka dan bersedia menerima kritik.
- b. Mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
 - c. Memberi pujian bagi yang berhasil dan memberi sangsi bagi yang salah.
 - d. Menumbuhkan rasa keakraban dan kekeluargaan.

Indikator digariskan Kantor Wilayah Depertemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa tengah terhadap tingkat keberhasilan Kepala Sekolah dalam menjalankan program-program sekolah selanjutnya diberikan penilaian-penilaian sebagai berikut :

1. Pendidik	200
2. Manajer	300
3. Administrasi	100
4. Penyelia	200
5. Pemimpin	200
Jumlah	1.000

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang terutama dilihat dari alasan diterapkannya MPMBS, bahwa sekolah mempunyai pelimpahan sistem pendidikan baru, yaitu yang semula pendidikan selalu berorientasi pusat (birokratik – sentralistik) sekarang sekolah mempunyai kelonggaran gerak dalam menentukan program dan strategi berbasis sekolah guna meningkatkan mutu. Perubahan sistem ini sangat dibutuhkan kemampuan secara manajerial dari

Kepala Sekolah, sebab hal yang baru sangat dibutuhkan Kepala sekolah yang berkemampuan tinggi guna memotivasi staf menuju keberhasilan program.

Berdasar pandangan tersebut maka peneliti mengajukan suatu rumusan masalah dalam penelitian tesis sebagai berikut.

“ Apakah kemampuan manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengendalian Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonogiri mempengaruhi keberhasilan produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas ? ”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di depan, maka tujuan penelitian seperti di bawah ini :

1. Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonogiri di Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui kemampuan manajerial yang dominan diantara perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengendalian dari Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonogiri di Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Mendapat gambaran yang nyata tentang pengaruh kemampuan manajerial Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wonogiri dalam melaksanakan tugas sebagai percontohan pelaksanaan Program MPMBS.

2. Agar Kepala Sekolah mengetahui posisi nyata terhadap kemampuan manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengendalian, guna meningkatkan kemampuannya sehingga akan lebih tercapai keberhasilan program MPMBS.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana mengenai keterkaitan pengaruh kemampuan manajerial terhadap kinerja sekolah.

E. Hipotesis Operasional

Style seorang pemimpin yang paling berhasil adalah pemimpin yang dapat melaksanakan fungsi kepemimpinan yaitu memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi atau pengawasan yang efisien dan membawa para pengikutnya pada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan (Kartini Kartono, 2001). Menurut Surat Keputusan menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor : 0296/U/1996 tanggal 1 Oktober 1998 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah, telah ditetapkan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan kepala sekolah sesuai dengan fungsi dan tugasnya yaitu sebagai pendidik, manajer, administrator, penyelia dan sebagai pemimpin.

Berdasarkan teori dan indikator-indikator keberhasilan kepala sekolah tersebut di atas dan atas dasar hasil temuan awal dilokasi penelitian yaitu di SMA

Negeri 2 Wonogiri, maka peneliti mengetengahkan hipotesis sebagai berikut :

“Kemampuan manajerial kepala sekolah mengenai perencanaan dan pengorganisasia, pengkoordinasian, kemampuan pengawasan diduga berpengaruh positif terhadap keberhasilan pelaksanaan program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonogiri “.